

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC KINERJA* (E-KINERJA) PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh :
Rahma Safitri

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tolok ukur kesuksesan pemerintahan dalam menjalankan program-programnya dan kualitas pelayanan publik yang diberikannya. Dalam usaha untuk mencapai keterukuran kinerja ASN, Badan Kepegawaian Negara menerapkan penilaian kinerja berbasis elektronik (e-kinerja) dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang sistem berbasis elektronik. Kebijakan elektronik kinerja berfungsi untuk memantau aktivitas para pegawai pada jam kerja, apakah pegawai tersebut ada melakukan kegiatan atau tidak. Hal ini akan diketahui oleh tim pemeriksa laporan kerja pegawai yang dilakukan setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu dan bahkan setiap hari.

Penerapan e-kinerja ini merupakan salah satu langkah dan proses perbaikan kinerja bagi para pegawai dilingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung menjadi lebih baik. Kebijakan e-kinerja ini kemudian diimplementasi agar para pegawai secara tidak langsung lebih bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya masing-masing tanpa harus ada perintah dari atasan. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini penerapan e-kinerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik dikarenakan hanya beberapa pegawai saja yang tidak bisa menggunakan e-kinerja sehingga di balitbangda tersendiri terdapat operator pembantu dalam pengisian e-kinerja.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, E-kinerja.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC PERFORMANCE (E-KINERJA) POLICY FOR STATE CIVIL SERVANTS (ASN) AT THE RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY OF THE LAMPUNG PROVINCE

By:

Rahma Safitri

The performance of the State Civil Apparatus (ASN) is a measure of the success of the government in carrying out its programs and the quality of public services it provides. In an effort to achieve measurability of ASN performance, the State Civil Service Agency implements an electronic-based performance assessment (e-performance) with the issuance of Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning electronic-based systems. The performance electronic policy serves to monitor the activities of employees during working hours, whether the employee is carrying out activities or not. This will be known by the inspection team of employee work reports which are carried out every year, every month, every week and even every day.

The implementation of e-performance is one of the steps and processes for improving performance for employees within the government of Bandar Lampung City for the better. This e-performance policy is then implemented so that employees are indirectly more responsible for their respective duties and work without having to receive orders from superiors. Based on data analysis in this study, the application of e-performance at the Regional Research and Development Agency (Balitbangda) of Lampung Province has been going well because only a few employees cannot use e-performance so that in Balitbangda itself there are assistant operators in filling out e-performance.

Keywords: Implementation, Policy, E-performance